

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis ekonomi tahun 1997 menyoroti kelemahan sistem pemerintahan sentralistik, mendorong banyak negara berkembang untuk melakukan desentralisasi kekuasaan (Reform et al., 2019). Pemerintah Indonesia pada tahun 1999 mengeluarkan UU No 22 Tahun 1999 tentang otonomi yang isinya pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri.

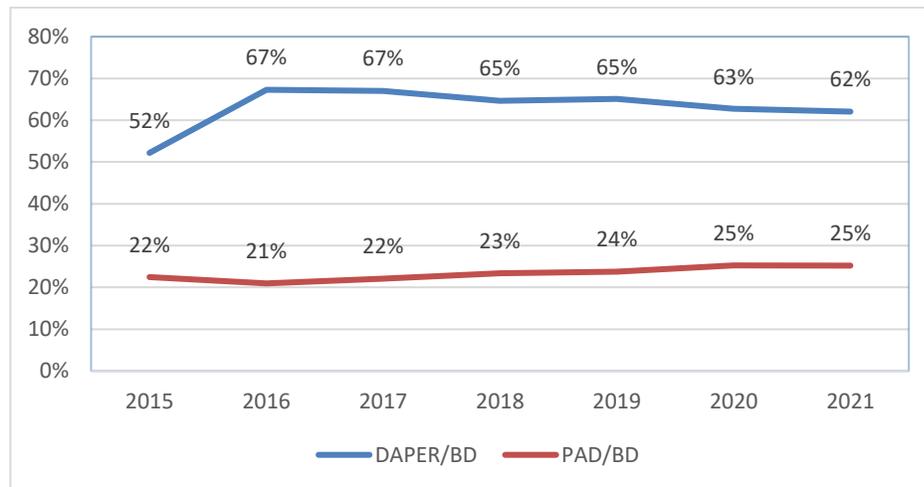
Otonomi daerah diberlakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Lintang Prabowo & M Tenku Rafli, 2022). Pelaksanaan otonomi daerah ini secara inheren disesuaikan dengan prinsip-prinsip dan tujuan negara yang lebih luas, seperti pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas hidup, dan penguatan demokrasi di tingkat lokal (Kharisma, 2013). Dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, diharapkan tercipta pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan efektif dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan negara secara keseluruhan.

Kebijakan otonomi daerah berimplikasi pada peningkatan pendanaan pemerintah daerah, yang memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang lebih optimal. Pemerintah pusat berupaya membantu pemerintah daerah dalam membiayai

pembangunan dan mengurangi kesenjangan keuangan, baik secara vertikal antara pusat dan daerah, maupun secara horizontal antar daerah (Maulana, 2019).

Kebijakan dana perimbangan harusnya menciptakan kemandirian fiskal daerah, yang tercermin dari proporsi pendapatan daerah yang meningkat (Setiaji & Adi Hari, 2007). Idealnya, daerah mempunyai kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publiknya. Namun, kenyataannya, banyak daerah masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga mereka sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Tekanan untuk meningkatkan PAD seringkali terhambat oleh berbagai faktor, seperti kapasitas fiskal yang terbatas, potensi ekonomi yang belum tergali secara optimal, atau kurangnya inovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru (Nasir, 2019).



Perbandingan PAD dan DAPER dalam Belanja Daerah di Indonesia

Gambar 1. 1 Perbandingan PAD dan DAPER dalam Belanja Daerah di Indonesia

Sumber: DJPA Kementerian Keuangan 2024

Gambar 1.1 ini memvisualisasikan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) dan Dana Perimbangan (DAPER) terhadap Belanja Daerah (BD) selama periode 2015-2021. Secara umum, terlihat bahwa proporsi DAPER/BD jauh lebih besar dibandingkan PAD/BD sepanjang periode tersebut. DAPER/BD mengalami peningkatan signifikan dari 52% pada tahun 2015 menjadi 67% pada tahun 2016, kemudian cenderung stabil dengan fluktuasi kecil hingga tahun 2021. Sementara itu, PAD/BD menunjukkan tren peningkatan yang lebih lambat dan konsisten dari 22% pada tahun 2015 menjadi 25% pada tahun 2021.

Perbedaan proporsi yang signifikan antara DAPER/BD dan PAD/BD mengindikasikan bahwa sebagian besar dana belanja daerah berasal dari transfer dana dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada sumber pendanaan eksternal. Stabilitas relatif pada proporsi DAPER/DB setelah

tahun 2016 mengisyaratkan adanya kebijakan atau faktor struktural yang mempengaruhi alokasi dana dari pemerintah pusat. Peningkatan yang lambat pada PAD/DB mengindikasikan potensi yang belum optimal dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara mandiri.

Secara teoritis, terdapat hubungan simetris antara pendapatan pemerintah dan tingkat pengeluaran pemerintah, di mana fluktuasi pada pendapatan idealnya mencerminkan perubahan yang sepadan pada pengeluaran. Namun, deviasi dari hubungan paralel ini dapat mengindikasikan adanya ilusi fiskal, yaitu distorsi sistematis dalam persepsi masyarakat terhadap parameter fiskal

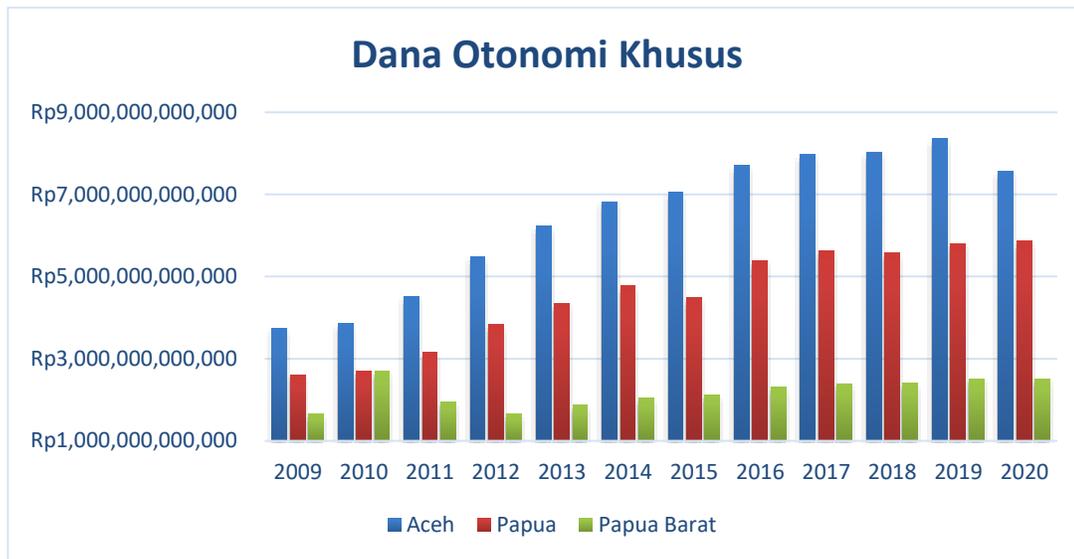
Awal munculnya Teori Ilusi Fiskal diperkenalkan oleh Amilcare Puviani, pada tahun 1903. Dalam teorinya, Puviani menjelaskan bahwa ilusi fiskal muncul ketika para pembuat keputusan yang memiliki kekuasaan dalam suatu institusi menciptakan persepsi tertentu dalam penyusunan anggaran, sehingga dapat mempengaruhi penilaian dan tindakan pihak lain .

Dalam konteks keuangan daerah, pemerintah daerah sering kali melakukan rekayasa anggaran untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif dalam membayar pajak atau retribusi, serta untuk menarik perhatian pemerintah pusat agar mengalokasikan dana yang lebih besar. Ketika terdapat respons yang tidak seimbang terkait penerimaan dan pengeluaran, hal ini dapat menjadi indikator adanya ilusi fiskal. Dengan kata lain, masyarakat mungkin tidak sepenuhnya menyadari bagaimana kebijakan fiskal memengaruhi biaya dan manfaat yang mereka terima,

sehingga mereka dapat memiliki persepsi yang keliru mengenai pembiayaan dan alokasi anggaran yang seharusnya.

Otonomi khusus merupakan pengaturan administratif dan pengakuan atas keberagaman budaya, sejarah, dan sosial masyarakat di daerah tersebut. Adanya otonomi khusus, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri (Arispen et al., 2021). Ini mengindikasikan bahwa daerah tersebut mendapatkan status istimewa dengan mendapatkan wewenang untuk menjalankan pemerintahannya secara mandiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya pemerintah pusat memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

Kebijakan otonomi daerah merupakan suatu pendekatan desentralisasi yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya sendiri (Sumpena et al., 2022). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dalam pelayanan public. Kebijakan otonomi daerah, yang didukung oleh dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengelola keuangan mereka secara mandiri (Rohim, 2024).



Perkembangan Penerimaan Dana Otonomi Khusus pada Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat

Gambar 1. 2 Perkembangan Penerimaan Dana Otonomi Khusus pada Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat

Sumber:DJPA Kementerian Keuangan 2024

Gambar 1.2 mengilustrasikan perkembangan penerimaan Dana Otonomi Khusus pada Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat. Dari gambar tersebut diketahui bahwa suntikan dana dari pemerintah cukup besar sehingga menimbulkan ketergantungan terhadap adanya Dana Otonomi Khusus. Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dialokasikan untuk Aceh dan wilayah Papua (Papua dan Papua Barat) bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Namun, pengelolaan dana Otsus yang kurang transparan dan akuntabel berpotensi menimbulkan ilusi fiskal di kalangan masyarakat.

Ilusi fiskal terjadi ketika masyarakat tidak memiliki informasi yang akurat mengenai jumlah dana yang diterima daerah, bagaimana dana tersebut dikelola, dan bagaimana dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan mereka. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan masyarakat memiliki persepsi yang keliru mengenai kinerja pemerintah daerah dan efektivitas penggunaan dana Otsus

Di Aceh, meskipun dana Otsus telah dialokasikan sejak tahun 2008 dan mencapai jumlah yang signifikan, tingkat kemiskinan masih relatif tinggi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan dana Otsus dan potensi terjadinya *flypaper effect*, di mana dana transfer dari pemerintah pusat tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan belanja modal dan barang jasa di daerah (Zulfan & Mustika, 2018). Selain itu, kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana Otsus juga membuka peluang terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi, yang semakin memperburuk ilusi fiskal di kalangan masyarakat

Di Papua dan Papua Barat, masalah serupa juga terjadi. Meskipun dana Otsus dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, masalah koordinasi antar instansi, dan faktor geografis menjadi kendala dalam menyalurkan dana Otsus secara efektif dan efisien. Akibatnya, dampak dana Otsus terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat belum optimal, dan ilusi fiskal dapat muncul ketika masyarakat tidak merasakan manfaat yang signifikan dari alokasi dana Otsus yang besar

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Aceh, Papua, dan Papua Barat berpotensi memicu fenomena ilusi fiskal, yang ditandai dengan kesenjangan informasi dan persepsi masyarakat terhadap alokasi serta dampak dana tersebut terhadap pembangunan dan kesejahteraan. Permasalahan transparansi, akuntabilitas, efektivitas penggunaan, dan potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana Otsus dapat menyebabkan masyarakat tidak memiliki pemahaman yang akurat mengenai kontribusi dana tersebut terhadap keuangan daerah dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi ilusi fiskal pada daerah yang menerima dana otonomi khusus dari pemerintah pusat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah
3. Apakah Dana Otonomi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah
4. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja daerah
5. Apakah terjadi ilusi fiskal pada daerah yang menerima dana otonomi khusus

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dari penelitian ini sebagai berikut

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah
2. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah
3. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Belanja Daerah
4. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah
5. Untuk mengetahui apakah terjadi ilusi fiskal pada daerah yang menerima dana otonomi khusus

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk Pemerintah Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan potensi terjadinya ilusi fiskal. Penelitian ini juga dapat membantu pemerintah daerah dalam mengevaluasi strategi pengelolaan keuangan mereka, sehingga alokasi dana

Otsus dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi pembaca, terutama akademisi dan praktisi di bidang ekonomi dan pemerintahan, penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika antara pendapatan daerah dan pengeluaran pemerintah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk eksplorasi lebih lanjut mengenai ilusi fiskal di daerah lain atau dalam konteks yang berbeda. Penelitian ini membuka ruang untuk analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana pengelolaan dana transfer mempengaruhi perilaku fiskal pemerintah daerah. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mengembangkan metodologi atau pendekatan baru untuk menilai efektivitas penggunaan dana Otsus serta dampaknya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di provinsi penerima lainnya.